

# WES - Newsletter

## WATER and ENVIRONMENTAL SANITATION

### AIR MINUM dan PENYEHATAN LINGKUNGAN



Media Informasi Proyek WES-UNICEF Kerjasama Pemerintah RI dan UNICEF

## Agenda

- ◆ 16 Agustus 2011  
Pemilihan Komite Pengarah dan Pengurus Harian Jejaring AMPL Hotel Parklane - Jakarta
  - ◆ 18-20 Agustus 2011  
Pelatihan fasilitator dan penyusunan Roadmap STBM Provinsi NTT Hotel GreeNia Kupang - NTT
  - ◆ 19 Agustus 2011  
Rakor WES UNICEF dan perkenalan *chief* kepada anggota Pokja AMPL Hotel Cemara - Jakarta
  - ◆ 22 Agustus 2011  
Pembahasan percepatan pencairan dana kerjasama RI-UNICEF Dit. KGM Bappenas - Jakarta
  - ◆ 23 Agustus 2011  
Pengembangan Konsep *Horizontal Learning* Pada Pembangunan AMPL Hotel Aryaduta - Jakarta
- Pertemuan tim WASH UNICEF-Bappenas dengan Suku dinas perumahan Jakarta Barat Kompleks Walikota Jakarta Barat
- ◆ 24 Agustus 2011  
Pembahasan *Draft* Manlak dan Manis tahap pertama Dit. PL Kementerian Kesehatan RI
  - ◆ 8 September 2011  
Sosialisasi STBM di Distrik Abepura Kota Jayapura
  - ◆ 11 September 2011  
Wawancara calon Fasilitator Kelembagaan di provinsi Papua dan Papua Barat Sekretariat WES - Jakarta

## Seleksi Calon Fasilitator Kelembagaan Provinsi 2011

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perencanaan pembangunan AMPL di tingkat provinsi Pemerintah Pusat melalui Program WES UNICEF menyediakan pendampingan melalui penugasan fasilitator kelembagaan (FK). Direncanakan pada tahun 2011 akan dipilih dua orang FK yang masing-masing bertugas di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Dari 63 pelamar yang memasukkan aplikasinya dipilih enam orang calon potensial untuk mengikuti tes wawancara. Fasilitator WASPOLA Nugroho Tomo membantu menyiapkan materi wawancara dan menggelar tes secara lisan (11/08/2011) dari pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB. Mengingat

sebagian besar calon tidak berkedudukan di Jakarta maka proses seleksi banyak dilakukan menggunakan sambungan telepon seluler. Selain aspek substansi calon-calon FK juga dinilai melalui penawaran gaji dan tunjangan yang disediakan pemerintah.

Melalui penilaian dan pertimbangan, Bappenas dan Unicef telah memutuskan dua orang yang terpilih sebagai FK Program WES UNICEF tingkat provinsi tahun 2011. Mereka yang terpilih adalah: Drs. I Dewa Bagus Made Adiyoga untuk penempatan Provinsi Papua dan Nasthain Gasba untuk penempatan Provinsi Papua Barat. Selanjutnya para FK terpilih akan menjalani kontrak sampai akhir Tahun 2011. ■ **FD**



## Pembelajaran horizontal: Meningkatkan Kinerja dalam Pembangunan AMPL

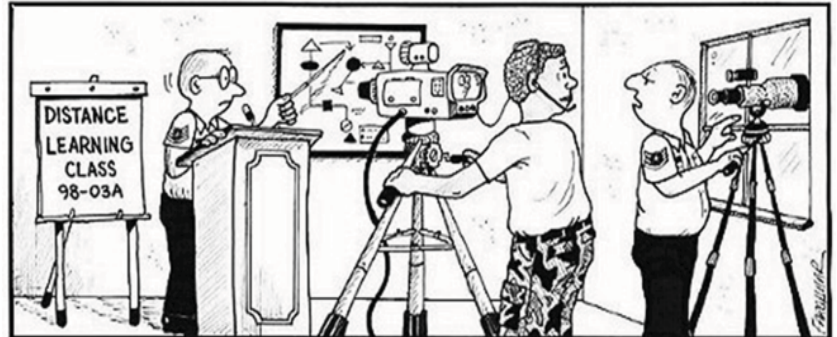
Banyak sekali pelaksanaan kegiatan pembangunan AMPL yang berhasil yang patut dipelajari, dan juga pembelajaran yang bisa diambil dari pelaksanaan kegiatan yang masih bersifat setempat atau lokal.

Melalui kegiatan pembelajaran horizontal (*Horizontal Learning*), diharapkan ke depannya dapat ditemukan terobosan-terobosan baru sehingga pembangunan AMPL bisa mandiri dan berkelanjutan. Demikian disampaikan oleh Gary Swisher, *Team Leader Waspola Facility* dan Eko Widji Purwanto, Kasubdit Air Minum dan Air Limbah Bappenas, dalam kata sambutan yang disampaikan dalam pembukaan Lokakarya *Horizontal Learning* di Hotel Aryaduta Jakarta, 23 Agustus 2011.

Dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh WASPOLA *Facility* bekerjasama dengan Kelompok Kerja AMPL Nasional, Gary Swisher menjelaskan bahwa *horizontal learning* pada saat ini sedang dikembangkan di Indonesia dan beberapa negara lain dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan. Sebagai sesuatu yang baru tentu saja perlu dilakukan pendalaman baik yang berkenaan dengan konsep maupun pelaksanaan di lapangan.

Pada lokakarya ini, pendalaman mengenai konsep *Horizontal Learning* dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu deduktif dan induktif, diawali dengan membongkar terminologi tersebut sampai ke *intellectual root*-nya, ujar Herry Widjanarko memberikan paparan teoritis.

Dalam paparannya, Herry menjelaskan mengenai beberapa hal antara lain :



LOOKS LIKE WE HAVE SOMEONE WITH A QUESTION IN SOUTH DAKOTA.

- Landasan teoritis dan Konsep *Horizontal Learning*;
- Aplikasi Praktis Konsep *Horizontal Learning*;
- Penerapan oleh berbagai lembaga di Indonesia dan di tingkat global;
- *Horizontal Learning* dalam Pembangunan AMPL.

Fasilitator WASPOLA *Facility* kemudian secara induktif mencari penjelasan terkait dengan mengeksplorasi pengalaman dan pengetahuan para peserta lokakarya. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu membagi peserta menjadi tiga kelompok dimana masing-masing fasilitator kelompok secara berturut turut mengeksplorasi pengalaman dan pengetahuan peserta mengenai:

- Mekanisme *horizontal learning*;
- *Best Practices* dalam pembangunan AMPL; dan
- Jenis/kegiatan dari *horizontal learning*.

Kelompok 1 yang membahas mekanisme *horizontal learning* mendalami mengenai: bagaimana pelaksanaan pembelajaran selama ini; bagaimana cara pelaksanaan *horizontal learning*; hal-hal penting apa yang perlu diperhatikan; bentuk kelembagaan *horizontal learning*;

dan siapa saja pemangku kepentingan yang harus dilibatkan.

Kelompok 2 yang memfokuskan pada *Best Practice* mendalami mengenai: pengertian *best practice*; kriteria *best practice*; identifikasi *best practices*; serta pengelompokannya.

Sedangkan kelompok 3 yang memfokuskan pada bentuk kegiatan *horizontal learning* mendalami mengenai: apa saja kegiatan yang termasuk dalam *horizontal learning*; hal penting apa yang perlu diperhatikan; apa kelebihan dan kekurangannya; serta jenis media pendukung pelaksanaan *horizontal learning*.

Dalam Lokakarya ini, yang tidak kalah menarik adalah penyampaian pengalaman pelaksanaan *horizontal learning* yang dilakukan oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) yang disampaikan oleh Edi. PERPAMSI telah menerapkan salah satu bagian dari *horizontal learning* yang dinamakan *Twinning Program*, yaitu proses belajar kepada perusahaan air minum yang dinilai memiliki kinerja bagus oleh perusahaan air minum yang kinerjanya dinilai kurang bagus. ■

**A.A. dan D.C. ([www.waspola.org](http://www.waspola.org))**

## Pemkab Bima Sosialisasikan Perda Pengelolaan AMPL

Kabupaten Bima merupakan salah satu dari dua daerah di Indonesia yang telah memiliki Perda Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM). Untuk menyebarkan produk hukum yang ditetapkan DPRD Kabupaten Bima tanggal 30 April 2011 dan ditandatangani Bupati 25 Mei 2011 tersebut, Bappeda Kabupaten Bima bekerjasama dengan UNICEF, mengadakan Sosialisasi Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang pengelolaan AMPL-BM. Panitia Pelaksana yang juga Sekretaris Pokja AMPL Kabupaten Bima, Amar Ma'ruf SH, menyatakan bahwa peserta sosialisasi tingkat Kabupaten Bima ini berjumlah 52 orang, terdiri para kepala SKPD, camat, guru, LSM, Pokja AMPL atas dukungan UNICEF.

"Latar belakang sosialisasi ini," lanjut Ma'ruf, "setelah Perda nomor 6/2011 tentang AMPL ini diundangkan, maka dengan sendirinya akan mengikat semua pihak. Salah satu kewajiban Pokja dan SKPD terkait untuk menyebar luaskan materi Perda ini di tingkat masyarakat."

Bupati Bima yang diwakili Kepala Bappeda Kabupaten Bima Drs. Muzakkir, M.Si dalam sambutannya menyatakan, "Indikator ke-

berhasilan pelaksanaan AMPL ini adalah meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat, sekolah dan swasta dalam menyikapi AMPL dari semakin banyaknya masyarakat yang membangun jamban keluarga secara swadaya, sekolah-sekolah yang memiliki jamban yang sehat." Oleh karena itu, menurut Muzakkir, tantangan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan AMPL ke depan adalah mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur AMPL secara swadaya dan kegiatan penyadaran masyarakat secara partisipatif mengenai dampak sanitasi yang buruk".

Pada kesempatan yang sama, Ir Suryadin dari Komisi II DPRD Kabupaten Bima dalam penyajiannya memaparkan, "Perda Nomor 6 tahun 2011 ini boleh dibilang kerangka normatif dunia akhirat, karena membahas masalah kebersihan."

Beliau pun mengungkapkan bahwa kebijakan legislasi memutuskan lahirnya Perda ini setelah melewati pembahasan yang alot. Instrumen Perda juga mengintegrasikan muatan penyehatan lingkungan, dan secara bertahap akan menjadi mata pelajaran khusus dalam bentuk muatan lokal. Perda ini juga

mengatur fungsi fasilitasi pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengelolaan air minum. "PNS pada instansi terkait merupakan fasilitator AMPL. Untuk ini maka, kebijakan pengawasan dan kemitraan adalah tugas bersama dalam ikut mensosialisasikan Perda kepada masyarakat akan pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)", tutur Ir Suryadin.

Nara sumber lainnya, Kabag Hukum Setda melalui Kasubag Perundang-undangan Julkifli, SH., M.Hum menyatakan, "Pengelolaan AMPL dilakukan dengan pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat, sehingga mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun evaluasi harus benar-benar tumbuh dari bawah (*bottom up*), yaitu dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar terutama masyarakat pengguna air. Dengan perkataan lain," lanjut Julkifli, "pendekatan yang diterapkan harus tanggap kebutuhan dan menempatkan masyarakat pada posisi teratas dan pengambilan keputusan terutama dalam aspek pemilihan sistem yang dibangun, pola pendanaan dan pengelolaan AMPL. Sebagai fasilitator, pemerintah berwenang memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara berkelanjutan dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat dalam membangun dan mengelola secara mandiri prasarana dan sarana AMPL." ■

(Humas 01)

a.n Kabag Humas & Protokol  
Kasubag Informasi & Pemberitaan  
Suryadin, S.S., M.Si  
<http://bimakab.go.id/>



foto: Pokja AMPL

## Indonesia tuan rumah pembelajaran sanitasi di Asia Timur dan Pasifik



foto: Ferdy

Indonesia terpilih sebagai lokasi kegiatan pertukaran pembelajaran Sanitasi di negara-negara regional Asia Timur dan Pasifik (*Regional Exchange Visits on Scaling Up Sanitation in East Asia and Pacific*) pada 17-23 September 2011 di Solo. Berawal dari pengalaman pengembangan program sanitasi pedesaan (total sanitasi dan pemasaran sanitasi, juga dikenal dengan TSSM) yang telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur tahun 2007 s/d 2010 dan pemasaran sanitasi di Kamboja, permintaan untuk mengetahui lebih jauh program tersebut pun banyak bermunculan.

Pemerintah Indonesia dianggap cukup berhasil bekerjasama dengan lembaga donor dan rekan kerjanya untuk mengembangkan konsep Total Sanitasi & Pemasaran Sanitasi (TSSM/STBM) dengan penguatan peningkatan kebutuhan masyarakat, pemasaran dan perbaikan sanitasi, serta penciptaan lingkungan yang mendukung sehingga menciptakan interaksi kebutuhan dan penyediaan sanitasi melalui mekanisme pasar.

Kota Solo terpilih sebagai tempat pertemuan karena dianggap strategis untuk melakukan kunjungan ke lima kabupaten dari 3 jenis proyek dengan karakteristik yang berbeda. Kabupaten Wonogiri dan

Klaten merupakan wilayah PAMSI-MAS yang dikelola langsung oleh pemerintah; Kabupaten Grobogan telah bekerjasama dengan Plan Internasional dalam melakukan fasilitasi sekaligus melakukan intervensi; serta Kab. Pacitan dan Ngawi yang difasilitasi WSP (Program Air & Sanitasi Bank Dunia) dimana pemerintah daerah telah mengembangkan program tingkat kabupaten yang merupakan kombinasi pendekatan total sanitasi dan pemasaran sanitasi (TSSM).

Selama kunjungan, peserta akan melakukan pertemuan dengan Bupati, diskusi sanitasi dengan Tim Koordinasi Air Minum dan Sanitasi dan kunjungan ke Desa Punung (Pacitan), Geneng (Ngawi), Terkesie dan Klambu (Grobogan), Bakalan (Wonogiri), Kebon (Klaten) untuk melakukan dialog bersama komite sanitasi, masyarakat pengguna, dan wirausaha sanitasi.

Hasil kunjungan lapangan akan digunakan sebagai bahan diskusi pada lokakarya yang akan diselenggarakan di Solo sekaligus menjadi bahan pembandingan proyek serupa di masing-masing negara.

Peserta lokakarya terdiri dari perwakilan pemerintah dan donor seperti Unicef, WaterAid, Plan International, ADB, Bank Dunia dan perwakilan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik meliputi Laos, Kamboja, Filipina, Timor Leste, Vietnam dan Papua Nugini. Diharapkan setelah kegiatan ini berakhir peserta dapat :

1. Mempelajari perbedaan yang dikerjakan oleh berbagai proyek dalam pengembangan sanitasi pedesaan khususnya dengan pendekatan CLTS, pemasaran sanitasi, penciptaan lingkungan yang mendukung;

2. Membangun konsensus tentang komponen kunci untuk pendekatan CLTS dan pemasaran sanitasi secara nasional;
3. Meningkatkan kolaborasi yang lebih kuat, keterkaitan dan kemitraan;
4. Membuat rekomendasi, bagaimana penyebarluasan pembelajaran dan peningkatan kapasitas antarnegara di tingkat regional.

Dalam kegiatan tersebut juga akan dilakukan dialog video jarak-jauh dengan Diminick de Waal, tenaga ahli WSP Regional Afrika yang akan melakukan presentasi mengenai "Tinjauan Status Negara: Konsep dan Metodologi". Pembelajaran metode yang telah dilaksanakan di Afrika ini diharapkan dapat dikembangkan juga di Asia Timur dan Pasifik sehingga masing-masing negara dapat mengetahui pencapaian terkininya. ■ <http://www.pppl.depkes.go.id>



WES-UNICEF

**Water and  
Environmental  
Sanitation**

Gedung Wisma Bakrie II, Lt.5  
Jl. HR Rasuna Said Kav. B-2  
Kuningan - Jakarta  
Telp./Fax.: (6221) 57942100  
email:

[sekretariat@wes-riunicef.org](mailto:sekretariat@wes-riunicef.org)

<http://wes-riunicef.org>